

# Penabulu

Laporan Tahun 2018



# **Torehan Karya untuk Bangsa**

Laporan Tahunan Yayasan Penabulu  
Tahun 2018

Penyusun:  
Tim Penabulu  
Tata letak:  
Tim Penabulu

Sumber gambar:  
Tim Proyek Penabulu



# *Torehan Karya untuk Bangsa*

Laporan Tahun 2018  
Yayasan Penabulu

# DAFTAR ISI

Torehan Karya untuk Bangsa (1)

Profile (3)

Program dan Lokasi (26)

Torehan Makna (27)

Laporan Keuangan (38)



Penanaman Mangrove di Palu Sulawesi Tengah sebagai sabuk alami penahan tsunami



## TOREHAN KARYA UNTUK BANGSA

Sepanjang tahun 2018 Indonesia mengalami beragam peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kemanusiaan. Bencana kemanusiaan seolah susul menyusul menghantam negeri bergelar zambrud khatulistiwa ini.

Bom bunuh diri di Surabaya, tewasnya lebih dari 100 orang penumpang kapal mesin sinar bangun yang tenggelam di Danau Toba, serta gempa 7SR yang mengguncang Lombok dan gempa 7,4SR yang disusul tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, merupakan peristiwa yang benar-benar mengguncang nalar kemanusiaan.

Belum lagi polarisasi dan intoleransi sebagai dampak situasi politik jelang pemilihan presiden tahun 2019 semakin nampak nyata di tahun ini. Masyarakat terbelah dan terbagi dalam kotak-kotak semu dengan perilaku yang sulit dipahami nalar sehat kemanusiaan.

Sungguh sebuah kondisi yang tidak dapat dibilang mudah bagi kami sebagai sebuah organisasi, dengan segenap keterbatasan yang kami miliki.

Kami menyadari, bahwa kami tidak mungkin abai dengan situasi yang terjadi di negeri yang kami cintai, namun apa yang harus kami lakukan kemudian?!

Sebagai kumpulan individu,

Sebagai sebuah keluarga,

Sebagai bagian dari anak-anak bangsa.

Pada akhirnya kami harus memilih untuk tetap mendayagunakan segenap sumber daya yang kami miliki, menetapkan posisi, dan mengambil peran melalui kerja-kerja nyata yang menyasar di seluruh level pemangku kepentingan, terutama di tingkatan tapak sebagai bentuk nyata upaya kami pada keberdayaan sektor masyarakat sipil Indonesia.

Pasar Berkelanjutan, Lingkungan dan Perubahan Iklim, serta Penguatan Kelembagaan merupakan fokus isu strategis untuk mengkerangkakan kerja-kerja yang kami lakukan di tahun 2018 ini. Dengan tanpa mengabaikan 6 isu strategis lain yang menjadi mandat organisasi.

Kami meyakini, kekuatan potensi lokal merupakan sumber daya utama keberdayaan masyarakat di tingkat tapak yang menjadi daya dukung bagi mereka untuk menghadapi berbagai persoalan yang ditimbulkan baik oleh manusia pun oleh alam.

Inisiatif-inisiatif baru berbasis kajian yang akurat dan dilakukan dengan pendekatan baru berbasis potensi lokal wajib, dan harus dilakukan dalam program-program penguatan serta pembangunan berbasis komunitas dan masyarakat di berbagai lini isu.

Dari titik ini kami kemudian meletakkan harapan, kekuatan komunitas dan masyarakat akan mempengaruhi sektor-sektor lain di negeri ini dan menjadi benteng terakhir dalam menghadapi segala bentuk dinamika yang mengancam negeri.

Kami menyadari bahwa untuk sampai di titik ini kami tidak akan dapat bekerja sendiri, membangun jejaring multisektoral dengan para aktor pembangunan terus kami lakukan melalui beragam program-program kolaboratif baik dengan dukungan pihak ke-3 atau dari internal organisasi.

Segenap upaya yang kami lakukan hingga tahun ini, merupakan sumbangsih kami, anak-anak bangsa untuk negeri tercinta kami.

**Eko Kurniawan Komara**  
Direktur Eksekutif



*Profile*



## YAYASAN PENABULU

Yayasan Penabulu didirikan di Jakarta sejak tahun 2002, dan disahkan oleh notaris Riana Hutapea, notaris di Jakarta, melalui Akta No. 1 tertanggal 22 Oktober 2003 dan dikukuhkan melalui SK Menteri Hukum dan HAM RI No: C-435 HT.01.02.TH 2004. Sejak berdirinya, Penabulu telah meletakkan visinya pada keberdayaan organisasi masyarakat sipil Indonesia.

Pada periode pertama 2002–2009, Penabulu menemukan momentumnya yang pertama, dengan fokus penguatan pada aspek pengelolaan keuangan organisasi nirlaba. PSAK 45 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 yang dikeluarkan oleh IAI tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang mulai diberlakukan efektif sejak tahun buku 2000 (kemudian direvisi pada tahun 2011) menjadi latar belakang utama kerja penguatan Penabulu pada periode tersebut. Berbasis standar pelaporan keuangan tersebut, tuntutan akuntabilitas organisasi nirlaba mulai disuarakan dengan kuat terutama oleh lembaga donor, penyumbang sumber daya terbesar organisasi masyarakat sipil Indonesia. Periode tersebut ditutup dengan pengembangan komunitas keuangan LSM, ruang berbagi pengetahuan dan literasi dengan sentuhan teknologi informasi dan komunikasi yang kala itu didorong berkembangnya era web interaktif 2.0, web yang memungkinkan adanya interaksi online antar anggota komunitas.

Pengalaman Penabulu sebelumnya dalam menguatkan kapasitas pengelolaan keuangan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, membawa Penabulu bersentuhan dengan elemen pengelolaan organisasi yang lain. Penabulu kemudian sampai pada kesimpulan dan keyakinan baru, bahwa transparansi, akuntabilitas serta keberlanjutan organisasi masyarakat sipil di Indonesia tidak hanya bisa dibangun di atas ketangguhan pilar pengelolaan keuangan belaka.

Maka pada periode kedua 2010–2014, Penabulu mencoba mengembangkan fokus kerja tambahan dengan titik tekan baru pada aspek penguatan pengelolaan kelembagaan dan pengelolaan program (perencanaan-pemantauan-evaluasi), pengelolaan sumber daya manusia, maksimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seiring dengan pengelolaan data-informasi-pengetahuan. Selain aspek manajemen tersebut, Penabulu juga mulai mengembangkan kompetensi dan portofolio pada upaya penggalangan sumber daya dan pengembangan model-model bisnis sosial.

Periode pertumbuhan kedua ini bersamaan dengan setengah-perjalanan transformasi besar organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Selain perubahan eksternal yang mendasar seperti perkembangan dahsyat era teknologi digital, pergeseran pendulum kekuatan ekonomi dunia, serta laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri; berubahnya isu dukungan dan pola pendanaan lembaga donor merupakan pemicu utama proses transformasi tersebut. Pada periode transformasi ini, penguatan kelembagaan organisasi masyarakat sipil di Indonesia mendapati dukungan puncaknya. Isu akuntabilitas sebagai sasaran penguatan di periode awal telah dikuatkan dengan isu profesionalitas (efektifitas dan efisiensi kinerja) dan juga isu keberlanjutan (atau ancaman ketidakberlanjutan) organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

Momentum tersebut memungkinkan Penabulu untuk mengembangkan unit-unit layanan utama dan pendukung, melakukan kreasi atas produk-produk hasil pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama ini, melakukan kerja kolaboratif bersama sekian banyak mitra strategis, yang tersebar di seluruh Indonesia, dan pada saat yang sama, mencoba mendiversifikasi sumber-sumber dukungan pendanaan organisasi.

Masih dalam kerangka tuntutan transformasi organisasi masyarakat sipil Indonesia, lahirlah Penabulu Alliance pada periode pertumbuhan kedua tersebut; aliansi strategis pengembangan gagasan, inisiatif, dan kegiatan penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil Indonesia dalambentuk 'keterikatan yang lepas', dimana setiap elemen didalamnya memiliki kebebasan gerak dalam pencapaian tujuannya masing-masing, namun tetap terikat secara kolektif pada visi bersama dalam jangka panjang, yaitu: keberdayaan dan keberlanjutan masyarakat sipil di Indonesia. Penabulu memaknai rekayasa

institusi ini sebagai sebuah upaya membangun keberlanjutan tujuan organisasi di masa depan; fokus pada kemandirian unit masing-masing dalam pelayanan, dan mencoba bertahan hidup dari keunggulan layanan dan produk dari masing-masing unit itu sendiri, tidak lagi harus bergantung pada dukungan lembaga donor.

Strategi dan proses pencapaian tatanan akhir periode pertumbuhan kedua Penabulu masih akan terus berlangsung dan masih perlu diuji serta dimodifikasi. Bersamaan dengan itu, Penabulu kini memasuki periode pertumbuhan ketiga sejak awal tahun 2015.

Pada periode baru ini, Penabulu menyadari bahwa definisi 'masyarakat sipil' perlu dimaknai ulang. Bukankah: komunitas pengelola sampah, kelompok-kelompok relawan, jurnalis independen, asosiasi profesi, usahawan sosial, kelompok-kelompok perempuan dan juga komunitas-komunitas difabel atau inisiatif kolektif lainnya yang menyodorkan solusi alternatif dan bahkan sekitar 74 ribu desa yang kini memperoleh sumber daya tambahan; seluruhnya merupakan elemen masa kini dari masyarakat sipil Indonesia? Di masa depan, Penabulu meyakini bahwa peran masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan akan semakin tak tergantikan sebagai penjaga keseimbangan akhir di antara aktor pembangunan lainnya: pemerintah dan sektor bisnis. Namun keberadaan masyarakat sipil sendiri sesungguhnya terancam oleh beberapa masalah internal, antara lain kesenjangan sumber daya pendukung kerja jangka panjang, lemahnya kapasitas kelembagaan dan buruknya konsolidasi kekuatan di masing-masing sektor isu.

Penabulu kini mendorong dirinya untuk mengambil peran sebagai 'civil society resource organization'. Sebagai organisasi sumber daya bagi masyarakat sipil di Indonesia, Penabulu akan berusaha sebaik-baiknya memobilisasi, mengelola dan menyalurkan sumber daya dalam bentuk apapun demi mendukung kerja-kerja masyarakat sipil di Indonesia. Penabulu sedapat mungkin akan mengkonversi energi yang diperoleh bagi upaya-upaya penguatan, pemberdayaan dan penjaminan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia. Merubah energi menjadi ruang tumbuh bersama, ruang konsolidasi kekuatan ide, gagasan dan keberpihakan masyarakat sipil di Indonesia, menjadi pemicu dan pemacu tata kelola pembangunan negeri ini yang lebih baik di masa depan.

## **VISI**

Masyarakat sipil Indonesia yang berdaya

## **MISI**

Mendorong keberdayaan dan keberlanjutan posisi dan peran organisasi masyarakat sipil di Indonesia melalui upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas organisasi; mobilisasi, pengelolaan dan penyaluran sumber daya; pengembangan kemitraan setara antar sektor pembangunan serta penggalangan partisipasi dan keterlibatan publik seluas-luasnya.

## **ISU STRATEGIS**

1. Pembangunan Inklusif
2. Pasar Berkerkelanjutan
3. Kemitraan Pemerintah – Swasta – Komunitas
4. Lingkungan dan Perubahan Iklim
5. Pemberdayaan Desa
6. Kesehatan Masyarakat
7. Akuntabilitas Publik
8. Penguatan Kelembagaan
9. TIK dan Pengelolaan Pengetahuan





## PEMBANGUNAN INKLUSIF

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Penabulu meyakini bahwa pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif.

Pembangunan kini adalah model pembangunan eksklusif. Pembangunan yang hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian; sehingga terkadang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan.

Banyak kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan karena jenis kelamin, etnis, usia, orientasi seksual, kecacatan atau kemiskinan. Ketidaksetaraan pembangunan jelas menjadi efek dari model pembangunan eksklusif tersebut. Aset terbesar akan selalu hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang.

Pembangunan inklusif yang juga mengurangi tingkat kemiskinan hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel.

Strategi utama pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai.

Program diimplementasikan sebagai pengembangan model pembangunan ekonomi lokal, dengan pelibatan penuh peran pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat sipil. Model ini diterjemahkan dalam bentuk intervensi program antara lain: kajian strategis potensi ekonomi daerah, pengembangan dokumen dan kesepakatan perencanaan secara partisipatif, pengembangan forum multipihak, advokasi kebijakan publik yang dibutuhkan untuk membangun iklim pembangunan inklusif dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah (terutama yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam).



## PASAR BERKELANJUTAN

Pendekatan rantai nilai (VCD) selama ini didasarkan pada pemahaman bahwa masyarakat miskin dan peluang ekonomi mereka sangat dipengaruhi oleh sistem pasar dinamis di mana mereka berada. Pendekatan ini bekerja dalam kerangka kerja intervensi yang mencoba mempengaruhi struktur dan sistem, serta pola relasi atau hubungan di dalam rantai nilai untuk memungkinkan usaha kecil dan menengah dapat meningkatkan produk dan proses mereka, dan dengan demikian berkontribusi lebih dan mendapatkan manfaat lebih dari rantai nilai yang telah diintervensi tersebut.

Penabulu meyakini bahwa selain perbaikan dan penyempurnaan rantai nilai komoditas, intervensi pasar secara komprehensif kini perlu juga dilakukan. Pendekatan M4P (Making Market Work for The Poor) merupakan sebuah pendekatan untuk mengembangkan sistem pasar yang lebih menguntungkan orang miskin, menawarkan peningkatan kapasitas dan tingkat kehidupan mereka, dengan cara mengidentifikasi solusi bagi kendala sistemik dan mendorong perbaikan sistem pasar dalam skala besar dan memastikan perubahan yang terjadi bersifat permanen dan berkelanjutan.

Pendekatan M4P akan dilakukan terhadap satu sistem pasar utuh, yaitu pada rantai pasar inti komoditas, dan kedua cakupan lensa tambahan yaitu lensa fungsi pendukung, dan lensa aturan-aturan formal dan informal yang mempengaruhi bagaimana sebuah sistem pasar bekerja. Fungsi pendukung dapat mencakup saluran informasi, akses permodalan, jalur distribusi dan penggudangan, dan fungsi lainnya yang seringkali menjadi

kendala/permasalahan mendasar bagi bekerjanya sistem pasar bagi kelompok miskin.

Program akan melakukan kreasi dan inovasi terbaik bagi penemuan solusi fasilitasi atas permasalahan sistemik yang ditemui di masing-masing fokus komoditas/sektor, sesuai dengan karakteristik, skala dan ruang lingkup khusus masing-masing kawasan sasaran program; antara lain melalui pendampingan pengembangan rencana bisnis berbasis riset, penguatan kapasitas manajemen unit usaha, tata kelola koperasi, layanan pengembangan bisnis, dan inisiasi pendirian BDS lokal.





## KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA-KOMUNITAS

Arah dan ukuran keberhasilan pembangunan kini akan sangat ditentukan seberapa besar irisan sinergi dapat dilakukan oleh tiga pihak pelaku pembangunan. Kenyataan menegaskan bahwa hingga kini tidak mungkin semua yang tercantum dalam rencana pembangunan daerah setempat diwujudkan oleh pemerintah secara sepihak. Oleh karena itu terdapat kebutuhan mutlak untuk mengembangkan model pembangunan yang melibatkan para pemangku kepentingan lain mulai dari tahapan pengembangan, desain dan pengelolaannya.

Pendekatan kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat (Public-Private-Community Partnership – PPCP) merupakan model operasional sinergis untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan dimana tiga pihak secara bersama-sama mengembangkan unit usaha/layanan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

Dalam kerangka tersebut, sektor swasta akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang dengan inklusifitas berimbang antara rantai produsen dan konsumen, sektor publik akan mendapatkan keuntungan dengan tambahan sumber daya dan nilai investasi serta keterjaminan partisipasi dan kepemilikan para pihak; sedangkan masyarakat akan memperoleh manfaat dengan perolehan keterampilan, pengetahuan dan teknologi baru.

Penabulu meyakini bahwa model kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat akan menjadi pendekatan terbaik untuk mencapai pertumbuhan inklusif dan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Program akan mendorong formulasi dan memfasilitasi terbangunnya kesepakatan, kesepakatan dan dukungan bersama bagi rencana pembangunan dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Pada saat yang bersamaan. Penabulu juga akan mendorong praktek-praktek pengelolaan terbaik diselenggarakan pada masing-masing sektor. Model kemitraan pembangunan tersebut akan dikembangkan pada skala pengelolaan yang paling kecil, mulai dari skala desa hingga tingkat kabupaten.

Secara kongkret, program akan mendorong terbangunnya dialog antara masing-masing pihak, melalui riset dan kajian, seminar/lokakarya, forum dialog, implementasi model kerjasama di tingkat lokal dan memfasilitasi terbangunnya kesepakatan-kesepakatan operasional multipihak dalam jangka panjang.



## LINGKUNGAN dan PERUBAHAN IKLIM

Indonesia adalah mega-biodiversity country nomor dua di dunia setelah Brazil. Indonesia juga memiliki tidak kurang dari 90 tipe ekosistem. Meskipun hanya merupakan 1,3% luas daratan di dunia, Indonesia memiliki 25% spesies ikan di dunia, 17% spesies burung, 16% spesies reptil dan amfibi, 12% spesies mamalia dan 10% spesies tumbuhan bunga. Indonesia yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau, memiliki hutan tropis terbesar di dunia setelah Brazil dengan luasan sekitar 114 juta hektar dan mencakup lebih dari setengah hutan tropis yang kini dipunyai Asia.

Pola pembangunan ekonomi tradisional akan selalu memberikan dampak berat bagi kelestarian lingkungan dan daya dukungnya bagi kehidupan manusia kini dan masa datang. Ekonomi Hijau yang kini didorongkan merupakan upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Ekonomi Hijau adalah konsep pembangunan rendah emisi, efisien dalam pengelolaan sumber daya dan menjunjung tinggi kesetaraan sosial.

Penabulu meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan terletak hampir sepenuhnya pada konsep ekonomi yang tepat. Jelas bahwa pembangunan rendah emisi ataupun ekonomi hijau masih memerlukan dorongan kuat dari organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

Pertumbuhan lapangan pekerjaan dan pendapatan harus didorong oleh investasi yang mengurangi emisi dan polusi, meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya, dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.

Program mendorong penguatan kelembagaan organisasi masyarakat sipil, koperasi dan kelompok usaha kecil menengah dalam manajemen dan kemampuan teknis pelestarian serta tata kelola usahanya, penguatan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, pengembangan perangkat dan panduan, memfasilitasi dialog kebijakan pada level nasional dan lokal serta pendokumentasian praktik terbaik dan petikan pembelajaran.





## PEMBERDAYAAN DESA

Program Desa Lestari merupakan strategi komprehensif bagi pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan, seimbang dan lestari. Program ini menekankan bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara partisipatif, berbasis kekuatan dan kemandirian masyarakat desa setempat dan berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan desa dalam pemenuhan kebutuhannya di masa depan.

Pengembangan model Desa Lestari memadukan 3 siklus secara simultan, yaitu siklus pengorganisasian masyarakat yang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun; siklus tata pemerintahan desa dan siklus keuangan desa yang keduanya berbasis periode tahunan.

Penabulu meyakini bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik akan menjadi syarat utama bagi terwujudnya desa yang lestari. Hanya desa, yang dikelola berbasis perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, mempertimbangkan keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, yang akan lestari.

Tujuan khusus dari program ini adalah untuk mendorong partisipasi, kemandirian dan keswadayaan masyarakat desa dalam tata kelola kelembagaan dan pemerintahan desa, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi dan keuangan desa, penguatan ekonomi masyarakat desa, pembentukan dan pengelolaan Koperasi dan BUMDesa, dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya lingkungan alam yang dimiliki desa.

Program akan memberikan fokus intervensi pada pelatihan dan pendampingan pengorganisasian masyarakat dan penguatan tata kelola pemerintahan dan keuangan desa, pengembangan perangkat dan alat bantu pendukung, pengembangan literasi terbuka, input teknologi dan pengembangan model-model terbaik bagi tujuan replikasi implementasi program sesuai dengan konteks, karakteristik, dan kearifan lokal masing-masing desa sasaran program.



## KESEHATAN MASYARAKAT

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan.

Kondisi umum kesehatan Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa komponen antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, telah didirikan di hampir seluruh wilayah Indonesia, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala.

Dalam kondisi keterjangkauan pelayanan yang masih belum merata dan kebutuhan perubahan perilaku masyarakat, negara telah mengakui peran penting organisasi masyarakat sipil, terutama bagi respon atas penyakit menular yang tingkat penyebarannya masih relatif tinggi di lingkungan masyarakat, seperti TBC, Malaria dan HIV/AIDS.

Penabulu meyakini bahwa perbaikan sistem penganggaran layanan kesehatan, perbaikan tata kelola layanan kesehatan, disamping penguatan organisasi masyarakat sipil dalam menjangkau komunitas populasi kunci dan mendorong efektifitas perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci

penting upaya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia jangka panjang.

Program terutama bekerja untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas organisasi masyarakat sipil yang bekerja di isu kesehatan masyarakat, baik pada aspek manajemen kelembagaan maupun pada kemampuan organisasi dalam memberdayakan dan memobilisasi komunitas populasi kunci; mendorong terbangunnya sistem perencanaan dan penganggaran terpadu pada tingkat kabupaten, dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program dukungan kesehatan itu sendiri.





## AKUNTABILITAS PUBLIK

Fenomena pengaturan diri atau swatata teramati pada hampir semua aspek kehidupan sehari-hari, mulai sistem fisik, kimia, biologi, psikologi, budaya dan juga sistem pemerintahan. Sistem swatata didefinisikan sebagai kemunculan spontan struktur-struktur baru dan bentuk-bentuk perilaku baru dalam sistem-sistem terbuka yang jauh dari kesetimbangan, yang dicirikan oleh putaran-putaran umpan balik internal dan nonlinier.

Perubahan secara acak mendorong terjadinya swatata, memungkinkan eksplorasi terhadap ruang-keadaan yang baru.

Pada sistem swatata, kita berhadapan dengan sistem kompleks yang berperilaku sederhana. Ketika negara tidak (belum) sungguh-sungguh hadir di tengah masyarakatnya, maka sistem swatata-lah yang sesungguhnya mewujud selama ini.

Penabulu meyakini bahwa pemahaman terhadap sistem swatata tersebut menjadi ruang subur bagi penguatan akuntabilitas publik. Salah satu elemen penting dalam penguatan akuntabilitas publik adalah hak publik untuk memperoleh informasi. Hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang relevan juga akan meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dan mendorong pemerintah menjadi lebih akuntabel. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak berarti banyak tanpa jaminan keterbukaan informasi publik yang memberikan ruang keikutsertaan warga dalam tata kelola pemerintahan (social participation), pertanggungjawaban pemerintah terhadap warga (social responsibility), dukungan warga terhadap jalannya

pemerintah (social support), dan kontrol dan pengawasan warga terhadap tindakan-tindakan pemerintah (social control).

Program didedikasikan untuk pengembangan upaya kolaborasi dalam penciptaan kondisi terbaik bagi pembangunan daerah pada tingkat kabupaten/kota hingga tingkatan desa dengan mendorong pemerintah untuk semakin terbuka dalam menyajikan informasi publik bagi warga, menjembatani atau membangun model saluran informasi dan dialog itu sendiri, serta meningkatkan daya pemahaman kritis dan kapasitas analisa warga atas sajian informasi publik tersebut.

Program akan melakukan berbagai kegiatan kajian dan penelitian terutama bagi pengenalan potensi pembangunan daerah; fasilitasi proses-proses perencanaan dan pengembangan kebijakan tingkat lokal, pengembangan literasi terbuka serta forum dialog yang setara antar pemerintah dan warga, dan terutama dengan kolaborasi pengembangan platform antarmuka yang mewadahi arus keterbukaan dan dialog atas informasi publik dengan maksimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang akan terus semakin berkembang.



## PENGUATAN KELEMBAGAAN

Program penguatan kelembagaan publik dan lembaga yang bekerja bagi kepentingan publik menjadi fokus kerja sejak awal berdirinya Penabulu dengan titik tekan utama diberikan kepada penguatan kapasitas organisasi nirlaba/organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

Penabulu berkesimpulan dan meyakini bahwa transparansi, akuntabilitas serta keberlanjutan organisasi masyarakat sipil di Indonesia tidak hanya bisa dibangun di atas ketangguhan pilar pengelolaan keuangan belaka.

Maka program mencoba mengembangkan fokus kerja tambahan dengan titik tekan baru pada aspek penguatan pengelolaan kelembagaan dan pengelolaan program (perencanaan-pemantauan-evaluasi), pengelolaan sumber daya manusia, maksimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seiring dengan pengelolaan data-informasi-pengetahuan. Selain aspek manajemen tersebut, Penabulu juga mulai mengembangkan kompetensi dan portofolio pada upaya penggalangan sumber daya dan pengembangan model-model bisnis sosial.

Program melakukan intervensi melalui kegiatan seminar, pelatihan, lokakarya, in-house training, pendampingan dan konsultansi, pengembangan literasi publik, pengembangan perangkat dan panduan, penyusunan video literasi dan tutorial, dan juga kemitraan dengan ataupun inisiasi lembaga penguatan kapasitas lokal.



## TIK dan PENGELOLAAN PENGETAHUAN

Perubahan lingkungan eksternal yang begitu cepat dan kental dengan pengaruh revolusi teknologi informasi, telah memberikan pesan perubahan yang kuat bagi seluruh organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah alat bagi perluasan jangkauan organisasi terhadap jaringan, komunitas dan konstituen; alat komunikasi efektif dengan sektor pemerintah dan sektor bisnis. TIK juga menjadi pendorong perbaikan tata kelola internal organisasi, sekaligus pengganda kekuatan sumber daya organisasi yang lain yaitu sumber daya keuangan, sumber daya manusia, serta data, informasi dan pengetahuan.

Penabulu meyakini bahwa penguasaan TIK dan pengelolaan pengetahuan oleh organisasi masyarakat sipil Indonesia kini telah menjadi syarat keberlangsungan dan keberlanjutan organisasi. Keduanya akan menjadi faktor pembeda yang menentukan konstalasi baru organisasi masyarakat sipil Indonesia masa depan.

Pengelolaan pengetahuan akan menjamin pertumbuhan organisasi, menguatkan radar sensitivitas dan menguatkan daya unkit sumber daya organisasi yang lainnya. Pengelolaan pengetahuan akan menyasar 3 dimensi organisasi yaitu dimensi obyek, agen dan konteks. Muara pengetahuan atau ingatan organisasi masyarakat sipil terbangun dari dua arus pengetahuan, yang masing-masing membutuhkan model pengelolaan khusus: arus pengalaman akan dikelola menggunakan pendekatan budaya organisasi dan arus informasi akan dikelola menggunakan pendekatan sistemik.

Untuk membuat muara pengetahuan atau ingatan organisasi mampu menjamin pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi maka dibutuhkan spiralisasi dan konversi pengetahuan, yang dikelola dalam organisasi pembelajar. Terdapat tiga elemen utama pembentuk kondisi pemungkin pengelolaan pengetahuan pada organisasi pembelajar yaitu: budaya organisasi, sistem, dan satu elemen baru yaitu: teknologi, terutama TIK.

Program mendorong penggunaan TIK sebagai alat dan media komunikasi organisasi yang efektif dan efisien baik bagi penguatan internal organisasi maupun perluasan jaringan para pihak, sebagai basis pengembangan web yang akan membuka peluang interaksi dan penggalangan keterlibatan konstituen, donor dan masyarakat luas dan sebagai pilihan baru penggunaan aplikasi yang membantu operasi organisasi, mendorong terbangunnya pola kerja, pendekatan, program dan layanan baru.

Intervensi program dilakukan melalui kampanye, pelatihan intens dan terfokus, pendampingan dan konsultasi, riset, kajian, diskusi reguler dan pengembangan literasi terbuka, serta kolaborasi pengembangan platform, produk, perangkat dan panduan.





Pedagang kain di pasar tradisional Patu, Sulawesi Tengah



Penyempurnaan  
Dokumen Acuan/SOP  
Organisasi  
**The SMERU Research  
Institute**

Integrasi Solusi  
Pengelolaan Sampah dan  
Perbaikan Lingkungan  
Hidup – Fase 2&3  
**PT JAPFA COMFEED TBK**

Event Organizer  
Jambore Masyarakat  
Gambut 2018  
**Badan Restorasi Gambut-  
United Nation  
Development Program**

Pengembangan  
Kemitraan Pengelolaan  
Lanskap KELOLA  
Sendang  
**Zoological Society of  
London**

KIAT NTB CSOs Program  
Management Capacity  
Strengthening in GESI of  
Infrastructure/Road  
Sector  
**Cardno Emerging Market  
Pty Ltd - DFAT**

Advanced Level Training  
and Apprenticeship of  
Purun Natural Fiber Craft  
in Kulon Progo  
**Badan Restorasi Gambut**

Pengembangan SOP dan  
Dukungan Implementasi  
untuk Yayasan The  
Coversation Indonesia  
**Knowledge Sector  
Initiative**

Sosialisasi Pentingnya  
Pemanfaatan Teknologi  
Informasi dalam  
Pengembangan  
Komoditas Holtikultura  
di Provinsi Jawa Timur  
**ICCO Cooperation**

## PROGRAM dan LOKASI



V4CP - Study on the Private  
Sector Perception and  
Engagement Toward WASH  
**SNV**

Pengembangan Unit Usaha  
Pengolahan dan Pemasaran  
Kakao Unggul – Fase 3  
**PT Pertamina Hulu Energi**

Sosialisasi Perencanaan  
Kawasan Perdesaan  
Kelapa dan Mina Purun  
**Badan Restorasi Gambut**

Loklatih Pengembangan  
Badan Usaha Milik Desa  
bagi Desa Peduli Gambut  
Angkatan I  
**KEMITRAAN - BRG**

DESK STUDY  
“Encouraging the Utilization  
of CSPO in Indonesia”  
Promoting Green Lifestyle  
for Responsible  
Consumption and  
Production in Indonesia  
towards Zero Deforestation  
**IBCSD**

Asesmen Organisasi:  
Yayasan Badak Indonesia  
**International Rhino  
Foundation**

Penguatan Kelembagaan:  
Cakra Wikara Indonesia  
**CWI**

Corporate Capacity  
Building in Effective  
Conflict Handling on  
Indonesia Land-Based  
Sectors  
**IBCSD**

Rapid Assesment:  
Market System and  
Emergency Response of  
Central Sulawesi  
**ICCO Cooperation – Kerk  
In Actie**

Training on Resources  
Mobilisation for 90 CSOs  
in 6 Regions in Indonesia  
**Robert Bosch Stiftung**  
Civic Engagement  
Alliance for Smallholders  
Empowerment  
**ICCO Cooperation**

Strengthening the  
Capacity of Civil Society  
Organizations of  
Effective Conservation  
Action in Indonesia  
**Critical Ecosystem  
Partnership Fund**

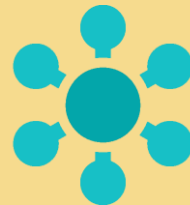


*Torehan Uakna*





Dana Hibah  
Rp 13.561.442.968



Penerima Manfaat  
212 OMS



Mitra Strategis  
54 OMS

Sepanjang tahun 2018, PENABULU mengelola dana hibah tidak kurang dari 13,5 milyar rupiah yang dengan berbagai sumber pendanaan baik yang berasal dari donor maupun sektor swasta. Di sepanjang tahun tersebut beragam inisiatif dan inkubasi program baru juga dikembangkan oleh PENABULU melalui mekanisme pendanaan internal organisasi.

Di tahun 2018, PENABULU menitik beratkan fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan Pasar Berkelanjutan, Lingkungan dan Perubahan Iklim, serta Penguatan Kelembagaan. Hal ini sejalan dengan keyakinan Penabulu bahwa keberdayaan sektor masyarakat sipil tidak dapat dilepaskan dari upaya memberdayakan sektor-sektor perekonomian di tingkat lokal melalui penguatan-penguatan yang dilakukan oleh dan untuk komunitas masyarakat lokal setempat. Lebih jauh, keberdayaan sektor ekonomi masyarakat pada akhirnya juga akan mempengaruhi daya adaptasi masyarakat untuk menghadapi perubahan iklim melalui perilaku yang “kembali menghargai” lingkungan dimana mereka berkehidupan.





Peserta pelatihan kerajinan serat alam tingkat mahir sedang memastikan tingkat kekeringan dari keranjang anyaman purun. Kulon Progo, Desember 2018





“Bekerja Dengan Teman-Teman di Penabulu Sangat Menyenangkan, Santai, Tapi Profesional”

Budi Santosa – Former Executive Director IBCSD



## MEDIASI, PILIHAN JALAN ADIL PENANGANAN KONFLIK BERBASIS LAHAN DI INDONESIA

**K**onflik merupakan salah satu dampak dari penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat dan menjadi hal yang perlu disikapi secara serius oleh pelaku dunia usaha yang bergerak di sektor berbasis lahan (antara lain: sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan). Pada tahun 2016 saja, tercatat terjadi 209 konflik dengan rincian 163 kasus pada sektor perkebunan, 25 kasus pada sektor kehutanan dan 21 kasus pada sektor pertambangan<sup>1</sup>. Tingginya angka kasus konflik berbasis lahan yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa konflik sumber daya alam terus menunjukkan eskalasi<sup>2</sup>.

Situasi konflik berbasis lahan ini kemudian dipahami oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia sebagai sebuah situasi yang harus direspon melalui upaya-upaya yang sistemik dan komprehensif dalam pencegahan, penanganan, dan penyelesaian, yang dipimpin oleh dunia usaha sebagai pihak yang bersinggungan langsung dengan potensi konflik sebagai dampak operasi bisnis mereka.

<sup>1</sup> Catatan Akhir Tahun, Konsorsium Pembaruan Agraria, 2016.

<sup>2</sup> Catatan Akhir Tahun, Kemitraan Pembangunan Sosial Berkelanjutan, 2016.

Di tahun 2016, untuk mendukung upaya mediasi konflik lahan dan sumber daya alam di Indonesia, KADIN Indonesia memprakarsai terbentuknya Conflict Resolution Unit (CRU), yang diinkubasi melalui Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) sebuah organisasi pelaku usaha anggota KADIN Indonesia.

Setahun kemudian, melalui IBCSD dengan dukungan pendanaan dari UKCCU<sup>3</sup>, PENABULU mendapatkan kesempatan untuk mendukung penguatan kapasitas dunia usaha dalam mekanisme penanganan konflik berbasis lahan melalui jalur mediasi dalam sebuah program yang bertajuk **Corporate Capacity Building In Effective Conflict Handling On Indonesia Land-Based Sectors**.

Program berdurasi 10 bulan ini berisi rangkaian kegiatan yang diawali dengan seri lokakarya di 10 provinsi rentan konflik berbasis lahan di Indonesia, yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang menjalankan operasi usaha berbasis lahan; sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor pertambangan. Seri lokakarya ini bertujuan untuk mengumpulkan praktik-praktik baik dan inovasi yang dilakukan perusahaan dalam upaya penanganan konflik dengan basis mediasi.

Kegiatan lain yang dilakukan oleh PENABULU secara simultan adalah seri diskusi terpumpun dengan perusahaan berbasis lahan yang berkantor di Jakarta, untuk melihat sejauh mana peluang CRU sebagai sebuah organisasi yang memberikan layanan pendukung mediasi konflik lahan dan sumber daya alam di Indonesia mampu untuk terus membangun kepercayaan publik bahwa mediasi merupakan alternatif penyelesaian konflik lahan dan sumber daya alam yang efektif dan efisien.

Jelang berakhirnya program, untuk melembagakan hasil-hasil pengetahuan antar perusahaan, diselenggarakan seri webinar dengan narasumber-narasumber yang merupakan praktisi langsung penanganan konflik berbasis mediasi. Narasumber yang dihadirkan dalam webinar tidak hanya dari kalangan perusahaan, namun juga dari pemerintah – Direktorat Pengaduan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – serta dari organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk penyelesaian konflik dengan jalur mediasi.

Hasil utama dari program adalah tersusunnya buku **Panduan Praktis Penanganan Konflik Berbasis Lahan**. Sebuah rujukan tidak hanya bagi duni usaha, namun juga bagi pihak-pihak lain yang memilih mediasi sebagai jalur penanganan konflik. Sebuah sumbangsih untuk mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan di masa depan.



---

<sup>3</sup> UK Climate Change Unit



## MOBILISASI SUMBERDAYA KUNCI KEBERLANJUTAN GERAKAN MASYARAKAT SIPIL INDONESIA

**K**eberlanjutan organisasi pada dasarnya merupakan tantangan utama bagi OMS<sup>4</sup> di Indonesia. Meski kesadaran dan pengakuan atas peran masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan mulai meningkat dan menjadi sebuah kebutuhan mutlak, pada kenyataannya OMS masih dihadapkan pada masalah-masalah yang mendasar; kesenjangan pendanaan jangka panjang, masih minimnya kemampuan dan kapasitas yang memadai untuk menjadi pelaku pembangunan yang komprehensif, lemahnya struktur dan kelembagaan pendukung yang mampu menempatkan masyarakat sipil sebagai mitra pembangunan yang setara, minimnya konsolidasi upaya advokasi kebijakan bersama di tingkat lokal maupun nasional, dan gagapnya masyarakat sipil memaknai dan menyikapi ‘keberlanjutan organisasi’.

Acapkali, keberlanjutan OMS dinarasikan secara sederhana dengan memupuk kapital sebanyak-banyaknya seperti layaknya sektor bisnis. Namun apakah dengan memiliki kapital yang berlebih organisasi kemudian dapat memastikan keberlanjutannya?

Setidaknya, ada dua aspek strategis yang menjadi kunci keberlanjutan OMS di Indonesia. Yang pertama adalah kemampuan organisasi untuk dapat menempatkan diri pada dinamika perubahan lingkungan yang deras terjadi, menjadi dinamis dan terus mendorong diri berubah sehingga mampu menemukan ruang-ruang **relevansi** baru.

Yang kedua adalah, kemampuan untuk mengelola dan **memobilisasi sumber daya** organisasi. Tidak hanya berfokus pada mencari sumber daya baru saja namun harus dimulai dengan sebaik-baiknya mengelola sumber daya yang telah dimiliki. Sumber daya yang tidak hanya berupa finansial, namun juga yang selama ini nyaris tidak dikelola oleh organisasi; sumber daya manusia, data-informasi-pengetahuan, teknologi, relawan, komunitas, jaringan, serta partisipasi masyarakat dan keterlibatan publik.

Sejak September 2017, Robert Bosch Stiftung memberikan dukungan kepada PENABULU untuk melatih 90 OMS di 6 provinsi di Indonesia dalam program **Training on Resources Mobilisation for 90 CSOs in 6 Regions in Indonesia**. Melalui mekanisme seleksi, ke-90 OMS dari berbagai wilayah di Indonesia dengan berbagai macam isu mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di 6 titik; Jawa Barat, Kalimantan Barat, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.

---

<sup>4</sup> Organisasi Masyarakat Sipil



## Loklatih Mobilisasi Sumber Daya Organisasi Masyarakat Sipil RBSG - Penabulu

Makasar - Sulawesi Selatan, 24-27 Oktober 2017

Pelatihan yang dihelat selama 5 hari dalam setiap pelaksanaanya ini diharapkan mampu membantu peserta untuk memaknai kembali relevansi organisasi mereka, untuk kemudian merumuskan strategi mobilisasi sumber daya yang paling tepat dan sesuai dengan karakteristik organisasi.

Jelang akhir program di Februari 2018, sebagai bentuk nyata dari hasil program lahirlah **FORUM SAMBADA**, sebuah ruang pertumbuhan bersama bagi OMS di Indonesia untuk tetap menjaga signifikansi keberadaan mereka. Diawali dengan 90 OMS yang mengikuti pelatihan di 6 provinsi. FORUM SAMBADA saat ini telah diikuti oleh lebih dari 100 OMS di Indonesia.

Selain sebagai ruang berbagi informasi dan peluang, kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh forum adalah diskusi virtual melalui WhatsApp Group yang diselenggarakan secara rutin di Jum'at ke-3 setiap bulan. Kehadiran narasumber dengan berbagai ragam kompetensi membuat setiap diskusi Jum'at ini selalu meninggalkan kesan yang mendalam, tidak hanya bagi anggota forum namun juga narasumber yang mengisi.

FORUM SAMBADA pada akhirnya mampu membuktikan keberadaannya sebagai sebuah jejaring pemberdaya OMS di Indonesia.



“Mengetahui, Bergaul, dan Belajar  
bersama dengan Penabulu membuat  
saya semakin percaya dan meyakini,  
teman adalah sumber kekuatan”

Adam Kumiawan – Direktur Balang Institute

## MENGUATKAN SIMPUL PEMBERDAYA LOKAL UNTUK KEBERDAYAAN DI TINGKAT TAPAK

**B**alang Institute – BALANG – adalah sebuah organisasi berbasis komunitas masyarakat lokal di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Mengawali karya di isu advokasi untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, berbasis masyarakat. Di tahun ke-9 ini, BALANG telah memantapkan diri untuk bekerja secara kolaboratif dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek, aktor utama yang mengubah pengetahuan menjadi tindakan nyata sehingga mampu mendorong terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Pertemuan pertama PENABULU dengan BALANG terjadi di awal tahun 2017, ketika kami memberikan bantuan asistensi teknis untuk penyusunan proposal dalam peluang pendanaan konservasi. Di bulan September 2017, BALANG menjadi salah satu peserta dalam pelatihan mobilisasi sumber daya di Makassar, Sulawesi Selatan yang kami helat dengan dukungan dari RBS<sup>5</sup>.

Rupanya, *insight* yang didapatkan oleh BALANG selama mengikuti pelatihan mobilisasi sumber daya menjadi titik balik bagi BALANG untuk berefleksi, melihat kembali ke dalam organisasi, menginventarisir segala sumber daya yang dimiliki, lalu memetakan

---

<sup>5</sup> Robert Bosch Stiftung

setiap potensi yang mampu dioptimalkan oleh organisasi, untuk tetap menjaga keberlanjutan karya-karya yang telah dilakukan.

Di tahun tersebut pula, BALANG mengimplementasikan program perlindungan tapak yang didukung oleh CEPF<sup>6</sup>, dengan kegiatan yang berfokus pada perencanaan penggunaan lahan yang mendukung konservasi dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Dengan mendorong lahirnya perencanaan dan implementasi yang mengkolaborasikan banyak pihak di dalamnya. Melalui program ini BALANG kembali bertemu dengan kami yang saat itu berperan sebagai *service provider* untuk peningkatan kapasitas mitra CEPF.

Dalam kerangka program peningkatan kapasitas mitra CEPF, salah satu pelatihan yang diikuti oleh BALANG adalah pelatihan tematik komoditas. Dalam pelatihan ini dipelajari berbagai macam cara untuk mengoptimalkan komoditas lokal sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dan hasilnya, **DAULU**, merk dagang dari kopi arabika Bantaeng merupakan komoditas yang berhasil dioptimalkan oleh BALANG bersama masyarakat sebagai bagian dari upaya merebut kedaulatan masyarakat atas akses terhadap pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

BALANG adalah salah satu organisasi di tingkat tapak yang memiliki potensi luar biasa. Ketidak engganannya BALANG untuk melakukan uji coba dan berimprovisasi ketika mendapatkan pengetahuan baru dari berbagai pihak, termasuk dari PENABULU melalui seri pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti, merupakan apresiasi luar biasa bagi kami sebagai sebuah organisasi yang fokus pada peningkatan kapasitas OMS.


Membangun relasi dengan organisasi-organisasi lokal di tingkat tapak merupakan hal yang senantiasa kami lakukan. Kesadaran kami mengatakan, untuk mencapai visi organisasi – Keberdayaan Masyarakat Sipil Indonesia – tidak akan mampu kami capai sendiri. Visi kami, hanya dapat kami capai melalui aksi-aksi kolaboratif dengan berbagai macam pihak, terutama organisasi masyarakat lokal di tapak, sebagai tuan rumah tanah mereka.

---

<sup>6</sup> Critical Ecosystem Partnership Fund



## MEMULIHKAN KEHIDUPAN DI TANAH GAMBUT, PULIHKAN KEMANUSIAAN-PULIHKAN INDONESIA



**K**awasan hidrologi gambut merupakan sebuah kawasan penyimpan karbon terbanyak dan memiliki ekosistem yang unik. Di Indonesia sendiri, kawasan gambut diperkirakan seluas 14,9 juta hektar<sup>7</sup>. 43% berada di Pulau Sumatera, 32% di Pulau Kalimantan, dan 25% terdapat di Papua. Namun sayangnya, ketidak tepatan pengelolaan lahan gambut seperti pembakaran lahan dan pengeringan, mengakibatkan kawasan penyimpan karbon terbesar ini mengalami kerusakan yang cukup parah.

Di tahun 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016, Pemerintah Republik Indonesia membentuk sebuah lembaga non struktural bernama **Badan Restorasi Gambut (BRG)** sebagai upaya percepatan pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut. Dalam mengemban amanat ini, BRG bekerja dengan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil baik di lokal wilayah target restorasi gambut, pun dengan organisasi di level nasional dan internasional.

Sejak tahun 2016, beragam aktivitas telah dilakukan oleh Yayasan Penabulu untuk mendukung upaya restorasi gambut melalui penguatan masyarakat desa dampingan BRG dalam Program Desa Peduli Gambut (DPG), dengan fokus pada revitalisasi sosial ekonomi masyarakat. Dalam karya-karya ini, Penabulu erat menjalin komunikasi dengan Kedeputan III BRG -Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan-

April tahun 2018, Penabulu mengorganisir Jambore Masyarakat Gambut 2018 di Kiram Park, Banjar Baru, Kalimantan Selatan. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan lebih dari 1500 orang petani dari tujuh provinsi prioritas restorasi gambut, untuk saling membagikan pengalaman, cerita-cerita sukses mengolah lahan gambut yang berkelanjutan, serta memperkenalkan kebudayaan lokal setempat yang nampak dari kesenian hingga makanan khas dari wilayah masing-masing.

November 2018, Penabulu kembali memfasilitasi 70 Desa Peduli Gambut dari 6 Provinsi target restorasi gambut, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dalam pelatihan Pengembangan BUMDesa dengan dukungan dari KEMITRAAN.

---

<sup>7</sup> Data Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian dan Balai Penelitian Tanah tahun 2011

Selain melatih Melalui proyek ini, Penabulu berhasil menyempurnakan seri modul penguatan kapasitas BUMDesa yakni; (1) Modul Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa, (2) Modul Pemetaan dan Perencanaan Usaha BUMDesa, dan (3) Modul Pengelolaan Keuangan Usaha BUMDesa.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah penghasil purun – tumbuhan sejenis rumput yang tumbuh liar dan endemik di lahan gambut – Oleh masyarakat setempat, purun dimanfaatkan sebagai bahan baku utama untuk membuat beragam kerajinan anyaman seperti tikar, dompet dan tas, yang dipasarkan secara lokal.

Melihat potensi lebih lanjut dari purun, tepat di akhir tahun, bekerja sama dengan Paguyuban Pengusaha Kerajinan Bina Karya Lestari, Kulon Progo Yogyakarta. Dengan dukungan dari BRG-RI, Penabulu memfasilitasi kegiatan Pelatihan Kerajinan Serat Alam Tingkat Mahir bagi para pengrajin anyaman purun dan rotan dari wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

18 pengrajin purun dari 3 kabupaten tersebut mengikuti pelatihan selama 1 bulan penuh di Bina Karya Lestari untuk mengolah purun yang merupakan serat alam endemik gambut menjadi beragam kerajinan yang lebih menarik sehingga dapat meningkatkan nilai jual purun sehingga dapat bersaing di pasar yang lebih luas.





*Laporan Kerangka*





## Heru Satria Rukmana

Perumahan Bukit Waringin      Telp : +62 21 87970090  
Blok A No. 7 - 8                      Fax : +62 21 87970090  
Bojong Gede 16320, Bogor        Kap\_hsr@yahoo.com

### LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No.: YPB18/LA/KAPHSR/050819

#### **Badan Pengurus dan Pengawas Yayasan Penabulu Jakarta**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Yayasan Penabulu terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018 serta laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

#### **Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### **Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk

### INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Number : YPB18/LA/KAPHSR/050819

#### **Board of Executives and Supervisory Yayasan Penabulu Jakarta**

*We have audited the accompanying financial statements Yayasan Penabulu which comprise the financial statements as of December 31, 2018 the related statement of activities, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

#### **Management's responsibility for the financial statements**

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

#### **Auditor's responsibility**

*Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.*

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but*



Honor. Satisfaction. Reliable

#### **Tanggung jawab auditor (lanjutan)**

merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami percaya bahwa bukti audit kami telah memperoleh cukup dan tepat untuk memberikan dasar untuk menyatakan opini audit kami.

#### **Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir yang kami sebutkan diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Yayasan Penabulu tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### **Auditor's responsibility (continued)**

*not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

#### **Opinion**

*In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Yayasan Penabulu as of December 31, 2018 its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

### **KANTOR AKUNTAN PUBLIK/REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS**

**HERU SATRIA RUKMANA**

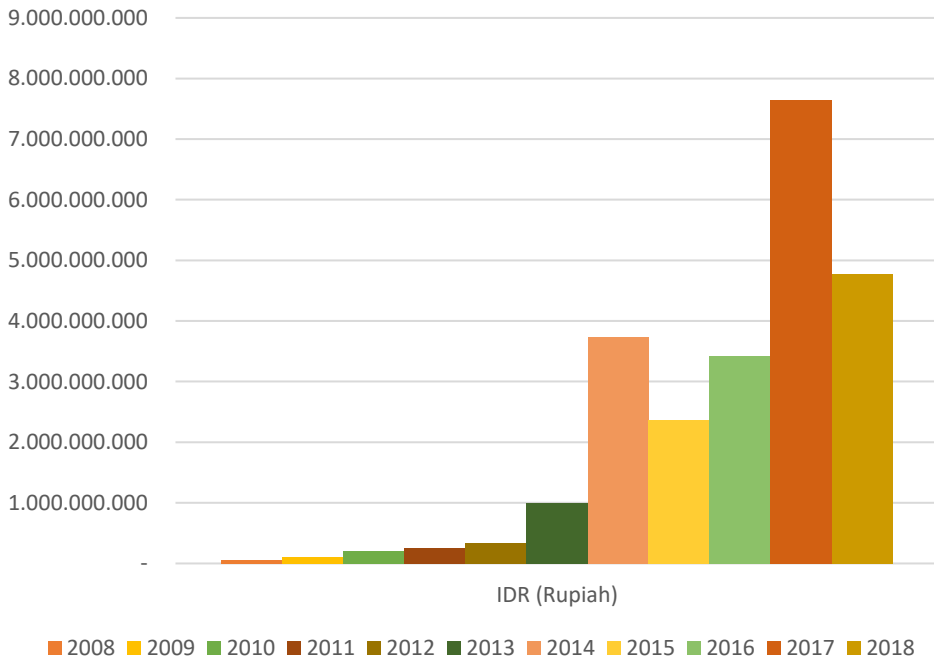
  
Kantor Akuntan Publik  
Heru Satria Rukmana

**Dr. Heru Satria Rukmana, Ak., MM., CA., CPA**

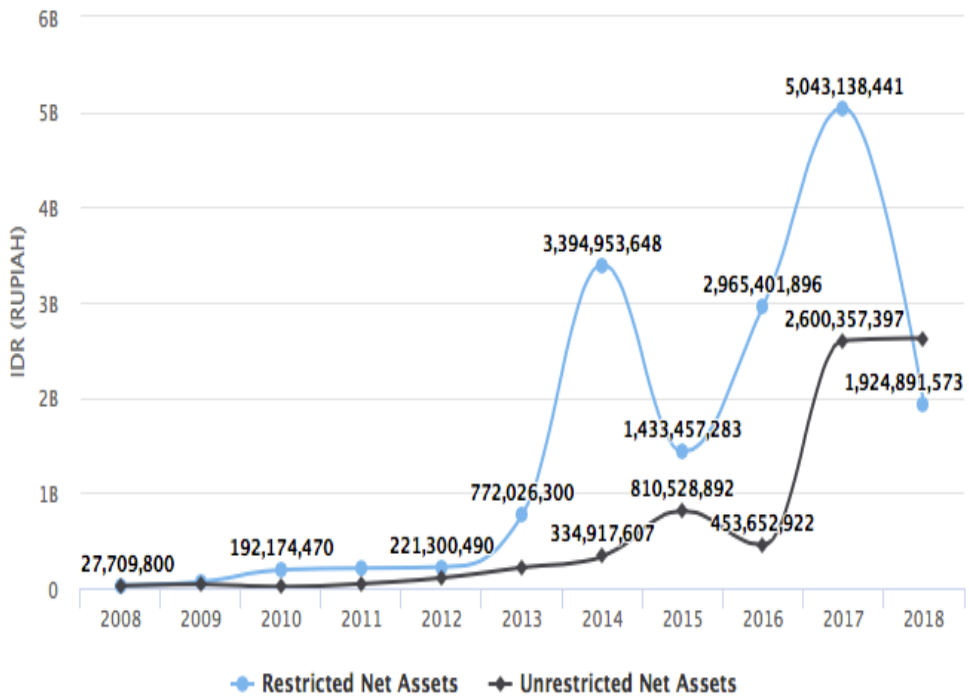
NRAP AP. 1520 / Public Accountant Registration Number AP.1520

05 Agustus, 2019/August 05, 2019

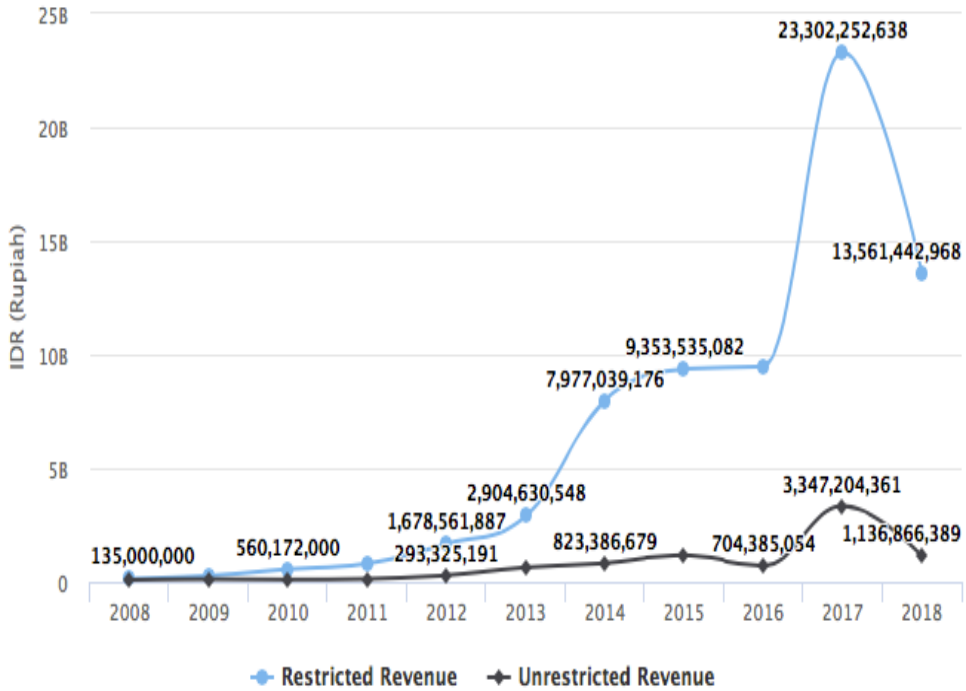
## ASSETS



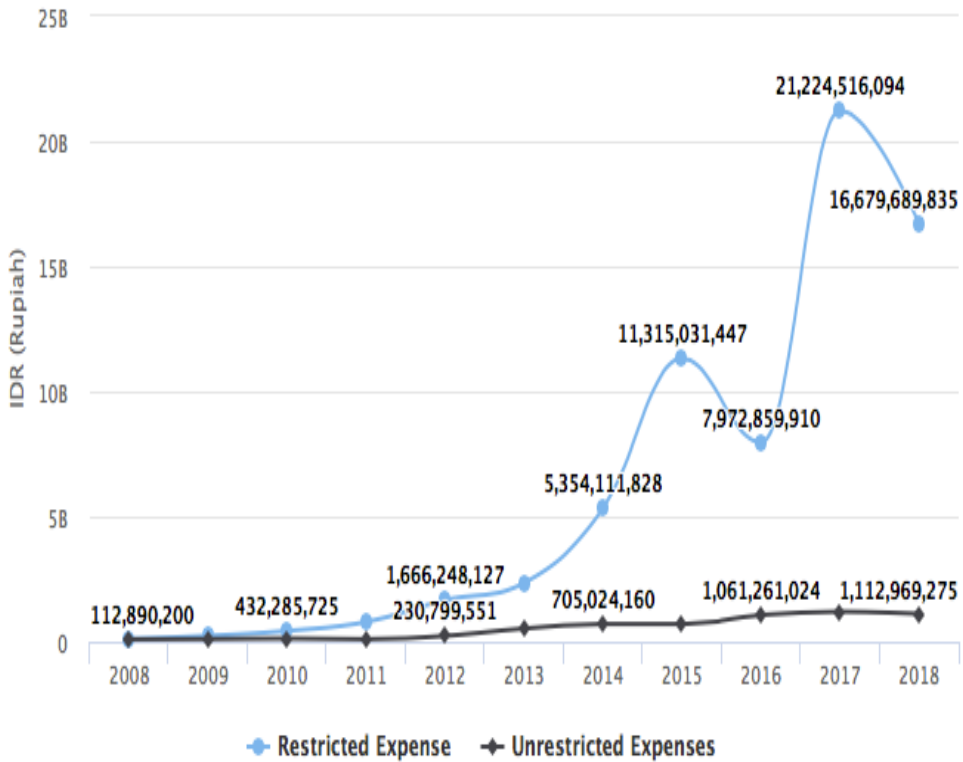
## RESTRICTED & UNRESTRICTED ASSET



## REVENUE



## EXPENSES



# PROGRAM

